

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Inovasi

Kata inovasi berasal dari bahasa inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Makmur & Rohana, 2012:9)

Menurut Oslo Manual (dalam Zuhal, 2013 :58), inovasi memiliki aspek yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi.

Selanjutnya Green, Howells & Miles (dalam Zulfa Nurdin, 2016:11) mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas (dalam Zulfa Nurdin, 2016:12) mendefinisikan inovasi sebagai peluncuran sesuatu yang baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah untuk menimbulkan perubahan besar yang radikal.

Sejalan dengan pendapat diatas Albury dan mulgan (dalam Zulfa Nurdin, 2016:12) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

Adapun inovasi menurut Evert M.Rogers (dalam Suwarno, 2008:9) adalah sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan (2009:36) sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru.

Sedangkan Fontana (2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang/jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen.

Selanjutnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:3) menerangkan salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan *hostile*, sehingga sebuah organisasi harus bisa mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk menjadi *competitive*.

Ada tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif yang disebutkan oleh Saleh dan Wang (dalam Ellitan dan Anatan, 2009:6) yaitu:

1. *Enterpreneurial* strategi yaitu berani mengambil resiko, melakukan pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen.
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.
3. Iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam organisasi disebarluaskan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan sistem imbalan yang efektif.

Borins (dalam Sangkala, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literature inovasi terdapat perbedaan antara temuan (*invention*), kreasi ide baru, dan inovasi. Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan.

Halversen (dalam Sangkala, 2013:26) mendefenisikan inovasi dalam pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku” Halversen menyatakan bahwa tidak ada satupun definisi yang mampu memberikan pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan.

Osborn & Brown (dalam Emy, 2015:80) menyatakan bahwa inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa lalu. Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari perubahan karena perubahan merepresentasikan sebuah pecahan dari konfigurasi pelayanan sebelum atau pada saat tersebut dan atau kemampuan profesionalnya. Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru kedalam pelayanan organisasi

dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Perubahan merupakan gambaran perubahan secara bertahap dari kondisi yang ada saat ini atau merupakan gambaran keberlanjutan dari masa lalu.

Pugh (dalam Emy, 2015:84) menilai inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi adalah sumber dari perkembangan sosial dan ekonomi, serta merupakan produk dan fasilitator dari pertukaran ide yang merupakan darah dari pembangunan. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan teknologi komunikasi, organisasi dan layanan baru disektor publik dan sector non-profit.

2.1.2 Tujuan Inovasi

Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016:51) mengatakan bahwa inovasi dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan memperoleh profit dan pertumbuhan.

Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui 1) pengenalan teknologi baru, 2) aplikasi baru dalam produk dan pelayanan, 3) penyumbangan pasar baru, 4) pengenalan bentuk baru organisasi.

Buffa, Butler, Miller (dalam Zulfa Nurdin, 2016:47) menyatakan bahwa inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, Ashoff dan Teece dalam Lengnick-Hall inovasi komponen strategis dibanyak perusahaan untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi, dan dilatar belakangi oleh ketergantungan badan teknologi yang berpengalaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal bentuk produk dan tata cara penyampaian produk. Strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi yang diterjemahkan dalam kerjasama komersial yang menguntungkan.

2.1.3 Sumber Inovasi

Menurut West (dalam Zulfa Nurdin, 2016:49), inovasi berasal dari kreatifitas ide-ide baru. Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut secara actual dan praktek. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi adalah:

- a. Tantangan dalam lingkungan organisasi
- b. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam maupun akhir suatu layanan
- c. Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi.
- d. Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk memastikan kerja gabungan yang efektif.
- e. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen
- f. Dukungan manajerial berupa keinginan personil untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru yang baik.
- g. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi
- h. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi

Menurut Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016:52) Sumber-sumber inovasi dapat diciptakan melalui:

- a. Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan disambut, kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatif
- b. Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah kesalahan dari ide kreatif, hal ini akan menghilangkan kreatifitas, seperti

yang dinyatakan William Mc. Knight dari 3M, “*Management that's destructive critical when mistake are made kills intitiatve*” (manajemen merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif).

- c. *Communicated total commitment* (komunikasikan seluruh komitmen personil)
- d. *Set goal then stand aside* (menyusun tujuan, mematuhinya). inovasi bersumber dari keterbukaan dari ide kreatif, tidak menghukum kesalahan dari ide kreatif, komunikasikan komitmen dan penyusunan tujuan.

2.1.4 Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik

Halversen (dalam Zulfa Nurdin, 2016:55) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor publik:

1. *Incremental innovation to radical innovation* (ditandai oleh tingkat perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada).
2. *Top down innovation to bottom-up innovation* (ditandai oleh mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarkhi, bermakna dari para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah).
3. *Need led innovations anda efficiency-led innovation* (ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien).

Sangkala (2003:31) menyatakan tipe inovasi dalam sektor publik dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Tipe Inovasi Dalam Sektor Publik

No	Tipe Inovasi	Contoh
1	Layanan baru atau perbaikan layanan	Perawatan kesehatan dirumah
2	Inovasi proses	Perubahan dalam membuat layanan atau produk
3	Inovasi administrasi	Penggunaan instrument kebijakan baru sebagai hasil dari sebuah perubahan kebijakan
4	Inovasi sistem	Sistem baru atau perubahan fundamental dari sistem yang ada dengan menetapkan organisasi baru atau pola kerjasama atau interaksi baru
5	Inovasi konseptual	Perubahan didalam memandang actor seperti perubahan dicapai dengan menggunakan konsep baru, misal pengintegrasian pengelolaan sumberdaya
6	Perubahan radikal yang bersifat rasional	Cara pandang atau pergeseran matrik mental pegawai dari sebuah organisasi

Sumber : Halverson (dalam Zulfa Nurdin, 2016:55)

Mulgan dan Albury (dalam Sangkala, 2013:31) memperkenalkan tipe inovasi yaitu 1) inkremental, 2) radikal, dan 3) sistemik bersumber dari level yang berbeda yaitu 1) local, 2) lintas organisasi, dan 3) nasional yang dihasilkan dalam instansi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait dengan inovasi:

- Inovasi kebijakan : arah dan inisiatif kebijakan baru
- Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat inovasi dan penggabungan.
- Inovasi *top-down* dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi *bottom-up* dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan menfasilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari organisasi atau jaringan di dalam sistem. Adapun *diffusion* adalah sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu terus menerus antar anggota sistem sosial. Patut dicatat dalam literatur bahwa fokus pada mekanisme dan proses dimana inovasi diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi) adalah penting sebagai fokus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan dan Albury dalam Sangkala, 2013:32).

Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta *standard operating system* yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam Zulfa Nurdin, 2006:15) inovasi dalam *governance* maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah lama. United Nation Development Program (UNDP dalam Zulfa Nurdin, 2006:15) menyatakan jenis inovasi antara lain:

1. Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaharuan institusi yang sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. Pembaharuan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan agar tidak membebani anggaran publik.
2. Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau teknik manajemen baru didalam administrasi publik. Upaya menemukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.

3. Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara pemberian layanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi terutama dalam hal *service delivery*, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.
4. Inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk pemerintahan baru (misal, Pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam kepemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan horizontal).

2.1.5 Strategi Inovasi

Inovasi dan analisa praktik yang sukses menunjukkan bahwa strategi utama didalam sektor pemerintahan yaitu :

- a. Memberikan layanan terintegrasi, yaitu Pemerintah menawarkan peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan disertai kenyamanan.
- b. Pelibatan warga, yaitu Pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna mensukseskan inovasi, dan memungkinkan warga untuk mengungkapkan kebutuhannya sekaligus memastikan inovasi sukses dan berkelanjutan.
- c. Menjalin Kerjasama/ Kolaborasi, yaitu Pemerintah melakukan kolaborasi dengan Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk kesamaan cara pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan layanan publik.
- d. Memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), yaitu Pemerintah memberikan layanan administrasi publik berbasis komputer dan internet untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah. *United Nation World Public Sector Report* (UNWPSR) tahun 2004 (Sangkala, dalam Zulfa Nurdin, 2016)

2.1.6 Level Inovasi

Level *innovative governance* dilihat dari sejauh mana pelaksanaan dari *best practices* menurut *United Nations Development Programme* (dalam Sangkala, 2013:8) terdiri atas:

1. Dampak (*Impact*), sebuah *best practice* harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (*partnership*), sebuah *best practice* harus didasarkan pada kemitraan antara aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
 - a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi.
 - b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun.
 - c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
 - d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membawa lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.

4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*) yakni:
 - a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik.
 - b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan warga masyarakat tersebut.
 - c. Penerimaan dan tanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
 - d. Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
 - e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (*gender equality* dan *social inclusion*) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda. Dalam pelaksanaan inovasi program, maka bagi penerima manfaat tidak dibedakan antara jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation with in local content dan transferability*) yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari inisiatif serta cara yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian untuk dapat dipelajari.

2.1.7 Dimensi Inovasi

Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik terdiri dari:

- a. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
- b. Inovasi *delivery* termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
- c. Inovasi administrative dan organisasional- termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi supplier.
- d. Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan strategi dan rationale baru.
- e. Inovasi interaksi sistem cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain.

2.1.8 Peluang dan Hambatan Inovasi

Penggunaan peluang menunjukkan suatu keberhasilan yang tidak pernah kita bayangkan atau rencanakan sebelumnya menjadi suatu kejutan yang positif, baik dalam organisasi pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi sosial lainnya. Ada banyak peluang yang bisa kita gunakan dalam rangka pengembangan inovasi terlebih jika kita mau belajar dari kenyataan dengan membandingkan ekspektasi atau harapan. Dalam rangka mewujudkan harapan setiap orang sebagai anggota organisasi ataupun anggota masyarakat, manusia perlu memotivasi dirinya masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang lebih serius dengan menggunakan kemampuan yang dimiliknya semaksimal mungkin.

Pada dasarnya terciptanya suatu inovasi berawal dari pencarian dan penemuan peluang yang bisa diperoleh anggota, baik dari luar organisasi maupun peluang dari dalam organisasi. Dinamika peluang berinovasi senantiasa saling memengaruhi antara kondisi yang sudah dapat diperkirakan telah direncanakan sebelumnya, dan suatu kondisi atau keadaan yang tidak pernah diperkirakan atau dipikirkan terlebih dahulu dalam kehidupan organisasi.

Perubahan persepsi masyarakat, antara lain adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan struktur, terjadinya perkembangan atau perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pemicu dalam melahirkan suatu peluang apabila kita sikapi dengan baik dalam rangka menciptakan inovasi. Perkembangan kondisi sosial sangatlah berfluktuasi. Hal ini ditentukan oleh tiap-tiap individu anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang berkembang secara dinamis adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang (*opportunity*).

Peluang dan inovasi merupakan sesuatu yang saling memperkuat. Peluang mampu menciptakan inovasi. Begitupun sebaliknya, hasil inovasi akan menciptakan peluang baru untuk berkarya lebih banyak. Yang dimaksud hambatan inovasi adalah suatu keadaan yang dirasakan seseorang atau beberapa orang yang dapat memengaruhi untuk tidak memfasilitasi keinginan pemikiran dan kemauan manusia dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam rangka menghasilkan pengetahuan, barang dan jasa baru, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan berinovasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban dan memberikan kesempatan kepada semua pihak dalam berpartisipasi dan membuka peluang kepada banyak pihak untuk ikut menikmati hasil-hasil inovasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi terhadap upaya mengurangi hambatan-hambatan manusia dalam melakukan tindakan inovasi. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan solusi tunggal dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Setiap hambatan bersifat multi dimensi dan tidak bersifat konseptual pemikiran semata, tetapi juga terdapat hambatan yang sifatnya teknis dalam kegiatan.

Dalam praktek inovasi program, terdapat beberapa faktor yang mendukung susksesnya inovasi yaitu :

- a. Ketegasan pimpinan mengambil kebijakan.
- b. Kerjasama dengan pihak di luar wilayah kerja.
- c. Visi dan Misi Desa.
- d. Kelancaran komunikasi.
- e. Potensi swadaya.
- f. Penerapan prinsip keadilan.
- g. Kebutuhan masyarakat dan sosial budaya. (Sangkala dalam Zulfa Nurdin, 2016)

Disamping faktor pendukung, dalam praktek inovasi program, juga terdapat faktor-faktor menjadi kendala yaitu :

- a. Inovasi program sebagai hal baru.
- b. Partisipasi masyarakat belum maksimal.
- c. Kolaborasi belum efektif.
- d. Pemberdayaan warga belum maksimal.
- e. Keterbatasan Potensi (Sangkala dalam Zulfa Nurdin, 2016)

Adapun beberapa hambatan sekaligus yang menjadi peluang dalam melakukan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang tidak lancar
- Saluran-saluran komunikasi yang tersumbat, tidak mengalir secara utuh menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi seperti ini berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat dapat dipastikan akan menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota organisasi atau anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, apabila saluran komunikasi mengalir dengan lancar tanpa mengalami sumbatan menjadi peluang emas bagi manusia dalam melakukan aktivitas mengembangkan inovasi yang dapat melahirkan kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan sanjungan dari orang lain.
2. Anggaran yang tidak cukup
- Sudah menjadi pendapat umum, bahwa keberhasilan merupakan segala kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota organisasi pemerintahan ataupun swasta yang menjadi keluhan adalah terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk menciptakan inovasi tidak datang begitu saja, melainkan harus dikerjakan melalui proses kegiatan yang memakan waktu lama dan perlu keseriusan yang sungguh-sungguh dalam rangka pencapaian suatu inovasi yang telah direncanakan. Kedua faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang dalam rangka menciptakan inovasi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan anggota organisasi pada khususnya.

2.2 Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprihatini, 2007: 9).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Nurcholis, 2011:77).

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara daripada warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perdes dan berdasarkan PP (Nurcholis, 2011:79)

2.2.1 Fungsi Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu dalam situasi sosial kelompok masyarakat (Rivai, 2004:37)

Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut makaperlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan. Pemerintah dianggap sangat penting karena berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan faktor tersebut (Thalidzu Ndrahah, 2000:45).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, maka Kepala Desa dilarang :

1. Menjadi pengurus partai politik.
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.

3. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
7. Menyalahgunakan wewenang.
8. Melanggar sumpah/janji jabatan.

2.3 Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan dan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo dalam Ulumiyah, 2011:195).

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (Dalam Ulumiyah, 2011:196) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
 4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan akan program tersebut.
 5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
 6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

2.3.1 Pembangunan Desa

Menurut Rizal Hamid (Dalam Zulfa Nurdin, 2016: 205) pembangunan dalam arti luas dapat ditafsirkan sebagai perubahan yang meliputi transformasi struktural dan perubahan cultural, politik, social, dan ekonomi. Perubahan yang dimaksud dalam strategi pembangunan lebih dilihat sebagai upaya perbaikan dalam proses pembangunan itu sendiri.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil,
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor,termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharu sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Menurut Rukminto Adi (2001:55) Secara teoritis, agar suatu desa berkembang dengan baik maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu:

1. Desa (dalam bentuk wadah).
2. Masyarakat desa.
3. Pemerintahan desa.

Pemerintah harus mempunyai pendekatan dan strategi-strategi dalam pembangunan agar bisa menimbulkan partisipasi masyarakat, pendekatan pembagunan masyarakat desa dipilih sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan nasional antara lain karena melalui pembangunan desa tersebut tercermin penarapan nilai-nilai demokrasi. Dimana secara teoritis tercermin keterpaduan antara perencanaan dari atas kebawah dan dari bawah keatas yaitu melalui lembaga musyawarah desa ataupun usulan-usulan dari kelurahan sebagai dari hasil-hasil evaluasi hasil pembangunan sebelumnya ataupun karena adanya permasalahan baru yang mereka hadapi. Telah terlihat jelas bahwa tujuan utama dari pembangunan desa adalah pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan, namun itu semua tidak akan bisa dicapai tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Adisasmita (2006:94) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yangsama. Strategi yang biasa diterapkan adalah melalui strategi ‘penyadaran’.Untuk berhasilnya program pembangunan desa tersebut, warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga ada keterlibatan emosional pada program tersebut, hal ini diharapkan dapat memberikan kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan yang mencakup seluruh bangsa. Untuk itu pemimpin harus menyebarluaskan kebijakan pembangunan desa dan secara aktif mengidentifikasi diri dengan kebijakan tersebut (Rukminto Adi, 2001:67)

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut Syafii (2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
 - b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Terkait pembangunan berkelanjutan, *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) sejak tahun 2015 hingga 2030. SDGs menekankan pada *People* (Masyarakat), *Planet* (Planet), *Peace* (Perdamaian), *Prosperity* (Kemakmuran), dan *Partnership* (Kemitraan). Terdiri dari 17 *goals* (Tujuan) yaitu : (SDGs dalam Rakor Kementerian Kesehatan, 2015)

1. Pemberantasan kemiskinan yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Nol kelaparan yaitu Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Pendidikan yang berkualitas yaitu Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan jender yaitu Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi yaitu Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Energi bersih dan terjangkau yaitu Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur yaitu Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
 10. Pengurangan kesenjangan yaitu Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara .
 11. Kota dan masyarakat berkelanjutan yaitu Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
 12. Konsumsi yang bertanggungjawab yaitu Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 13. Aksi perubahan iklim yaitu Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
 14. Kehidupan bawah laut yaitu Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
 15. Kehidupan didarat yaitu Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
 16. Perdamaian dan keadilan yaitu Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
 17. Kemitraan demi mencapai tujuan yaitu Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.2 Kesejahteraan

Menurut Modo Muhammad Sucipto (dalam Khadijah, 2013:31)

menyatakan bahwa : *“Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti sentosa, aman dan makmur terlepas dari segala macam gangguan dan kesulitan”*. Berdasarkan pendapat tersebut, keadaan sejahtera dimaksudkan keadaan sentosa, aman, makmur serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran hidup terpenuhi, dengan demikian keadaan sejahtera dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Aspek ekonomi merupakan aspek yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dalam hal ini aspek ekonomi seseorang yang terdiri atas pendapatan, kebutuhan pokok, pemilikan harta benda, merupakan cermin dari tingkat hidup seseorang dapat diukur oleh keadaan ekonomi yang bersangkutan, sehubungan dengan hal ini Mubyarto (dalam Khadijah,2013 :32) mengatakan :

“Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan aspek ekonomi yaitu jumlah pendapatan, macam dan jumlah barang yang dimiliki atau dikuasai serta kebebasan untuk menentukan barang atau usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan hidupnya”.

Kalau dilihat dari jumlah pendapatan, M.C. Suprapti dan Djemen Bale (dalam Khadijah, 2013:32) menyatakan bahwa :

“Tingkat kesejahteraan dapat di ukur dengan sampai dimana tingkat pendapatan. Dari tingkat pendapatan ini berapa persen yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) dan seterusnya dan sampai dimana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya”.

Sementara itu, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat menjadi ukuran terhadap kehidupan ekonomi seseorang atau sekelompok orang.

Seperti yang dikemukakan Emil Salim (dalam Khadijah,2013:32) yang mengatakan bahwa : “*Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan*”.

Mengenai kebutuhan pokok yaitu perumahan, Parsudi Suparlan (dalam Khadijah, 2013:33) menyatakan bahwa : “*Rumah merupakan kebutuhan hidup yang pokok bagi manusia bagaimanapun caranya dan dengan kondisi apapun selalu diusahakan oleh manusia untuk mendapatkannya. Pentingnya rumah bagi manusia bukan hanya fungsinya sebagai tempat tinggal atau berteduh, tetapi juga sebagai fungsi lainnya yang saling berkaitan pada hakikatnya berkenaan dengan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia*”.

Menurut Marpaung (2005: 203), kesejahteraan adalah gagasan, diperlukan langkah nyata untuk mewujudkannya. Kesejahteraan adalah tunas harapan, diperlukan optimisme untuk menumbuhkannya kesejahteraan adalah usaha, diperlukan keteguhan hati untuk mencapainya.

Menurut Darmawan Triwibowo (2006:21), yang mencakup komponen dalam kesejahteraan rakyat yaitu :

- a. Kesehatan.
- b. Pendidikan.
- c. Perumahan.
- d. Pelayanan kerja.
- e. Pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*), yang meliputi bantuan sosial.
- f. Pelayanan.

Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima fungsi pokok yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi - kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumberdaya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang terorganisir lainnya. Fauzik Lendriyono (2007:105)

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah “Dengan mengembangkan potensi swadaya dan keswadayaan yang ada melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam masyarakat yang bersangkutan” Rahardjo (dalam Nur Basarini, 2003:21).

Rahadjo (dalam Nur Basarini, 2003:21) menyatakan bahwa swadaya adalah upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasar pada sumber daya yang dimiliki. Sedangkan keswadayaan masyarakat dipahami sebagai semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dengan memanfaatkan daya yang mereka miliki. Selain itu, Swadaya masyarakat merupakan suatu kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

2.4 Peraturan Desa Lubuk Kembang Sari

Dalam Naskah Akademik UU Tentang Desa Tahun 2007, Sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus dan bertanggungjawab) menyusun Peraturan Desa. Perdes disusun oleh Kepala Desa dan BPD sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, Perdes disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Peraturan Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Desa Lubuk Kembang Sari dibuat adalah untuk pembangunan berkelanjutan yang menciptakan kesejahteraan masyarakat, perpaduan pembangunan fisik dan juga pembangunan SDM, yang berbasis kekuatan sosial pada komunitas Desa, maksudnya untuk melakukan berbagai kegiatan yang menekankan pada bagaimana masyarakat secara komunal bisa bahu membahu, menjalankan kegiatan yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, mereka dengan cara swadaya dan mandiri yang berbasis komunitas.

Peraturan Desa Lubuk Kembang Sari untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya telah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam, pada awalnya masih sebatas norma atau kearifan lokal, sekarang sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Peraturan Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

NO	PERATURAN DESA TENTANG :	NOMOR	TANGGAL
1	Buah sawit	01 Tahun 2007	10 -05-2007
2	Pentas hiburan	02 Tahun 2007	11 -06-2008
3	Poskesdes	03 Tahun 2009	01 -07-2009
4	Pekat	04 Tahun 2009	10 -07-2010
5	Pemulung	05 Tahun 2009	10 -10-2010
6	Ambulan Desa	06 Tahun 2011	20 -08-2011
7	Adm Surat- surat	07 Tahun 2011	20 -08-2011
8	Pungutan swadaya	08 Tahun 2011	20 -08-2011
9	Pemerintah Desa	09 Tahun 2011	20 -08-2011
10	BPD	10 Tahun 2011	20-09-2011
11	LKMD	11 Tahun 2011	20-09-2011
12	PKK	12 Tahun 2011	10-10-2011
13	LINMAS	13 Tahun 2011	10-10-2011
14	Karang Taruna	14 Tahun 2011	10 -10-2011
15	Kebun Desa	15 Tahun 2012	10 -08-2012
16	RPJMD	16 Tahun 2012	01 -08-2012
17	Siskamling	17 Tahun 2012	10 -08-2012
18	Posyandu	18Tahun 2012	10 -08-2012
19	Posyandu Lansia	19 Tahun 2012	10 -10-2012
20	Posyandu Gizi	20 Tahun 2012	10 -10-2012
21	Posyandu Narkoba	21 Tahun 2012	10 -10-2012
22	Kesehatan lingkungan	22 Tahun 2012	20 -11-2012
23	Gotong royong	23 Tahun 2012	20-11-2012
24	Tanggap darurat	24 Tahun 2012	20-11-2012
25	Pendidikan	25 Tahun 2012	20-11-2012
26	Pendidikan AlQur'an	26 Tahun 2012	20-11-2012
27	Perpustakaan	27 Tahun 2013	10-01-2013
28	Lembaga Adat	28 Tahun 2013	10-01-2013
29	Wirid Kliwon	29 Tahun 2013	10-01-2013
30	Sosial Masyarakat	30 Tahun 2013	10-01-2013
31	Batas Desa	31 Tahun 2013	10-01-2013
32	Kader KPM	32 Tahun 2013	10-01-2013

Sumber : Pemerintahan Desa Lubuk Kembang Sari, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas, ditambahkan bahwa Perdes Lubuk Kembang Sari berorientasi pada pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya melalui proses menumbuh kembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan , serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. (MDGs dalam Pedoman Operasional PNPM, 2014).

Sejak tahun 2015 MDGs dilanjutkan dengan SDGs, yang memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan Peraturan Desa Lubuk Kembang Sari tetap berorientasi pada pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu Pemberantasan kemiskinan, Nol kelaparan, Kesehatan yang baik, Pendidikan yang berkualitas, Kesetaraan jender, Air bersih dan sanitasi, Energi bersih dan terjangkau, Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri, inovasi, dan infrastruktur, Pengurangan kesenjangan, Kota dan masyarakat berkelanjutan, Konsumsi yang bertanggungjawab, Aksi perubahan iklim, Kehidupan bawah laut, Kehidupan didarat, Perdamaian dan keadilan, Kemitraan demi mencapai tujuan . (SDGs dalam Rakor Kementerian Kesehatan, 2015)

Dari target pencapaian *goal* (tujuan) SDGs diatas, diketahui bahwa posisi Inovasi Kepala Desa Lubuk Kembang Sari terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pada : Kesehatan yang baik, Pendidikan berkualitas, dan Infrastruktur yang berketahanan.

2.5 Keuangan Desa

Terkait inovasi Kepala Desa Lubuk Kembang Sari dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari, maka diciptakan sumber keuangan desa tidak berasal dari bantuan pemerintah, tapi berasal dari swadaya masyarakat petani sawit yang sepakat untuk menyumbangkan dana melalui Pemerintah Desa yang jumlah sumbangannya disesuaikan dengan luas lahan sawit yang dikelola masing-masing petani sawit. Jumlah sumbangan yang diberikan melalui Pemerintahan Desa Lubuk Kembang Sari untuk inovasi program kesejahteraan masyarakat adalah Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hektar luas lahan sawit yang dimiliki petani. Dana yang terhimpun dari petani sawit menjadi keuangan desa dan diperuntukkan hanya untuk inovasi program menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari.

Masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari patut mendukung inovasi program dalam hal ketersediaan dana desa, sebab mereka adalah bagian dari pemerintahan itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagikelanjutan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari. Swadaya masyarakat secara sukarela dalam mengembangkan desanya bukanlah hal yang melanggar aturan, bahkan masyarakat bahu-membahu mengatasi persoalan keuangan desa terasa sangat membantu beban keuangan Pemerintah Desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Zulfa Nurdin, Tahun 2016. “Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016)

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses terjadinya inovasi, jenis inovasi dan level inovasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, di desa Bone-Bone serta melakukan wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian terhadap inovasi program kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang diketahui dengan menggunakan tiga dimensi yaitu proses terjadinya inovasi, jenis inovasi dan level inovasi. Jenis inovasi terbagi tiga yaitu *incremental innovation to radical innovation, top down innovation to bottom up innovation, dan need led innovation and efficiency-led innovation*. Sedangkan level inovasi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, dan pengecualian sosial. Proses terjadinya inovasi merupakan inisiatif dari kepala desa. Adapun gambaran level inovasi pada program kawasan bebas asap rokok telah memenuhi indikator yang ada. Sedangkan untuk jenis inovasi yaitu *top down innovation to bottom-up innovation* dikarenakan inovasi ini merupakan ide baru dan berawal dari pemimpin.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada kriteria pada level inovasi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengembangkan kriteria pada level inovasi tidak hanya tentang kesehatan tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat lebih luas sehingga akan diketahui sejauhmana dampak inovasi Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan para lansia/ jompo, kesejahteraan guru MDA, dan penyiapan lahan untuk rumah layak huni.

2.6.2 Endang Suwadana, Tahun 2015. “Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif dalam Penguatan Desa Inovatif di Provinsi Banten” (PIT Nasional Ke-2 IWI, Banten, 2015)

Fokus penelitian ini untuk mengetahui : (1) Gambaran terakhir mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di (empat) desa inovatif yang telah ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dokumen SIDa Provinsi Banten; (2) kehadiran (eksistensi) lembaga kolaboratif (aktor ABG) di dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa inovatif tersebut dan kesiapannya dalam menghadapi implementasi UU Desa; dan (3) Untuk melakukan identifikasi desa-desa lain di Provinsi Banten yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi desa-desa inovatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bedasarkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara mendalam (indepth interview) kepada responden yang memiliki pengalaman dan terkait dengan permasalahan (purposive sampling). Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah: (1) Penyusunan data; (2) Klasifikasi data; (3) Pengolahan data; dan (4) Interpretasi hasil pengolahan data. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil : (1) bahwa desa-desa yang telah ditetapkan menjadi desa inovasi di dalam dokumen SIDa Provinsi Banten tahun 2012, kampung teuweul dapat dikategorikan sebagai desa inovasi. (2) desa inovasi di dalam dokumen SIDa Provinsi Banten tahun 2012, sesungguhnya kampung teuweul yang menjadi fokus penelitianpun, hampir tidak menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan; (3) Kelembagaan kolaboratif (ABG) di tingkat pemerintah daerah sudah mengambil peran dalam kegiatan ekonomi di desa-desa inovatif tersebut, hanya saja intensitasnya masih perlu ditingkatkan, (4) Lembaga-lembaga kolaboratif di tingkat desa belum siap dalam implementasi UU Desa, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan desa inovatif di masing-masing desa; dan (5) Dari hasil identifikasi desa-desa di Provinsi Banten yang saat ini merupakan binaan dari masing-masing SKPD, ada beberapa desa yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai desa inovatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitian dan aktifitas yang diteliti dalam proses inovasi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan penelitian di Desa Lubuk Kembang Sari sekaligus mengidentifikasi aktifitas desa terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpotensi untuk menjadi desa inovasi.

Alasan penulis mengambil rujukan dari penelitian terdahulu, karena penelitian terdahulu sangat relevan menjadi acuan untuk penelitian ini, bedanya terletak pada inovasi Kepala Desa dengan program yang berbeda. Penulis menitik beratkan menggali informasi untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses inovasi dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari dengan faktor - faktor yang mendukung, serta kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi pada saat Kepala Desa melakukan inovasi dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari. Untuk memberikan gambaran hasil penelitian terdahulu, penulis disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.	Zulfa Nurdin (2016)	Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses terjadinya inovasi, jenis inovasi dan level inovasi.	Hasil penelitian terhadap inovasi program kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang diketahui dengan menggunakan tiga dimensi yaitu proses terjadinya inovasi, jenis inovasi dan level inovasi. Jenis inovasi terbagi tiga yaitu incremental innovation to radical innovation, top down innovation to bottom up innovation, dan need led	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada kriteria pada level inovasi. Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan kriteria pada level inovasi tidak hanya tentang kesehatan tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat lebih luas sehingga akan diketahui sejauhmana dampak inovasi Kepala Desa dalam peningkatan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang menutup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat sertifikat hak cipta. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	© Hak cipta milik UIN Suska Riau			<p>innovation and efficiency-led innovation. Sedangkan level inovasi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, dan pengecualian sosial. Proses terjadinya inovasi merupakan inisiatif dari kepala desa. Adapun gambaran level inovasi pada program kawasan bebas asap rokok telah memenuhi indikator yang ada. Sedangkan untuk jenis inovasi yaitu top down innovation to bottom-up innovation dikarenakan inovasi ini merupakan ide baru dan berawal dari pemimpin.</p>	<p>kesejahteraan para lansia/jompo, kesejahteraan guru MDA, dan penyiapan lahan untuk rumah layak huni.</p>
		Kajian Penguanan Lembaga Kolaboratif dalam Penguanan Desa Inovatif di Provinsi Banten	Endang Suwadana dkk (2015)	<p>Fokus penelitian ini untuk mengetahui : (1) Gambaran terakhir mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di (empat) desa inovatif yang telah ditetapkan dalam dokumen SIDa Provinsi Banten; (2) kehadiran (eksistensi) lembaga kolaboratif (aktor ABG) di dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa inovatif tersebut</p>	<p>Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: (1) bahwa desa-desa yang telah ditetapkan menjadi desa inovasi di dalam dokumen SIDa Provinsi Banten tahun 2012, kampung teuweul dapat dikategorikan sebagai desa inovasi. (2) desa inovasi di dalam dokumen SIDa Provinsi Banten tahun 2012, sesungguhnya kampung teuweul yang menjadi fokus penelitianpun, hampir tidak menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan; (3) Kelembagaan kolaboratif (ABG) di tingkat pemerintah daerah sudah mengambil peran dalam kegiatan ekonomi di desa-desa inovatif tersebut, hanya saja intensitasnya masih perlu ditingkatkan; (4) Lembaga-lembaga kolaboratif di tingkat</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang menquotip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		dan kesiapannya dalam menghadapi implementasi UU Desa; dan (3) Untuk melakukan identifikasi desa-desa lain di Provinsi Banten yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi desa-desa inovatif.	desa belum siap dalam implementasi UU Desa, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan desa inovatif di masing-masing desa; dan (5) Dari hasil identifikasi desa-desa di Provinsi Banten yang saat ini merupakan binaan dari masing-masing SKPD, ada beberapa desa yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai desa inovatif.	
--	--	--	---	--

Sumber : Data Olahan, 2017

2.7 Konsep Operasional

Untuk lebih memudahkan penafsiran tentang makna istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna beberapa konsep operasional penelitian sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mensukseskan inovasi program yaitu :

- Memberikan layanan terintegrasi.
- Pelibatan warga.
- Menjalin kerjasama/ Kolaborasi.
- Memanfaatkan Teknologi Informasi.

2. Inovasi

Inovasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai trobosan-trobosan baru berupa : a) Peningkatan kesehatan lansia/ para jompo, b) Peningkatan kesejahteraan guru MDA, c) Penyiapan lahan untuk tapak rumah yang dilakukan Kepala Desa Lubuk Kembang Sari.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lubuk Kembang Sari beserta perangkat desa, dan lembaga desa yang melakukan inovasi program dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan warga untuk memenuhi Kesehatan yang baik, Pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang berketahtanan.

5. Pendukung

Pendukung dalam penelitian ini dimaknai sebagai hal yang membantu kesuksesan inovasi program yaitu : Ketegasan pimpinan mengambil kebijakan, Kerjasama dengan pihak di luar wilayah kerja, Visi dan Misi Desa, Kelancaran komunikasi, Potensi swadaya, Penerapan prinsip keadilan, Kebutuhan masyarakat dan sosial budaya.

6. Kendala

Kendala dalam penelitian ini dimaknai sebagai hal yang menghambat menghalangi kemajuan pelaksanaan inovasi program yaitu : Inovasi program sebagai hal baru, Partisipasi masyarakat belum maksimal, Kolaborasi belum efektif, Pemberdayaan warga belum maksimal, dan Keterbatasan Potensi.

2.8 Kerangka Pemikiran

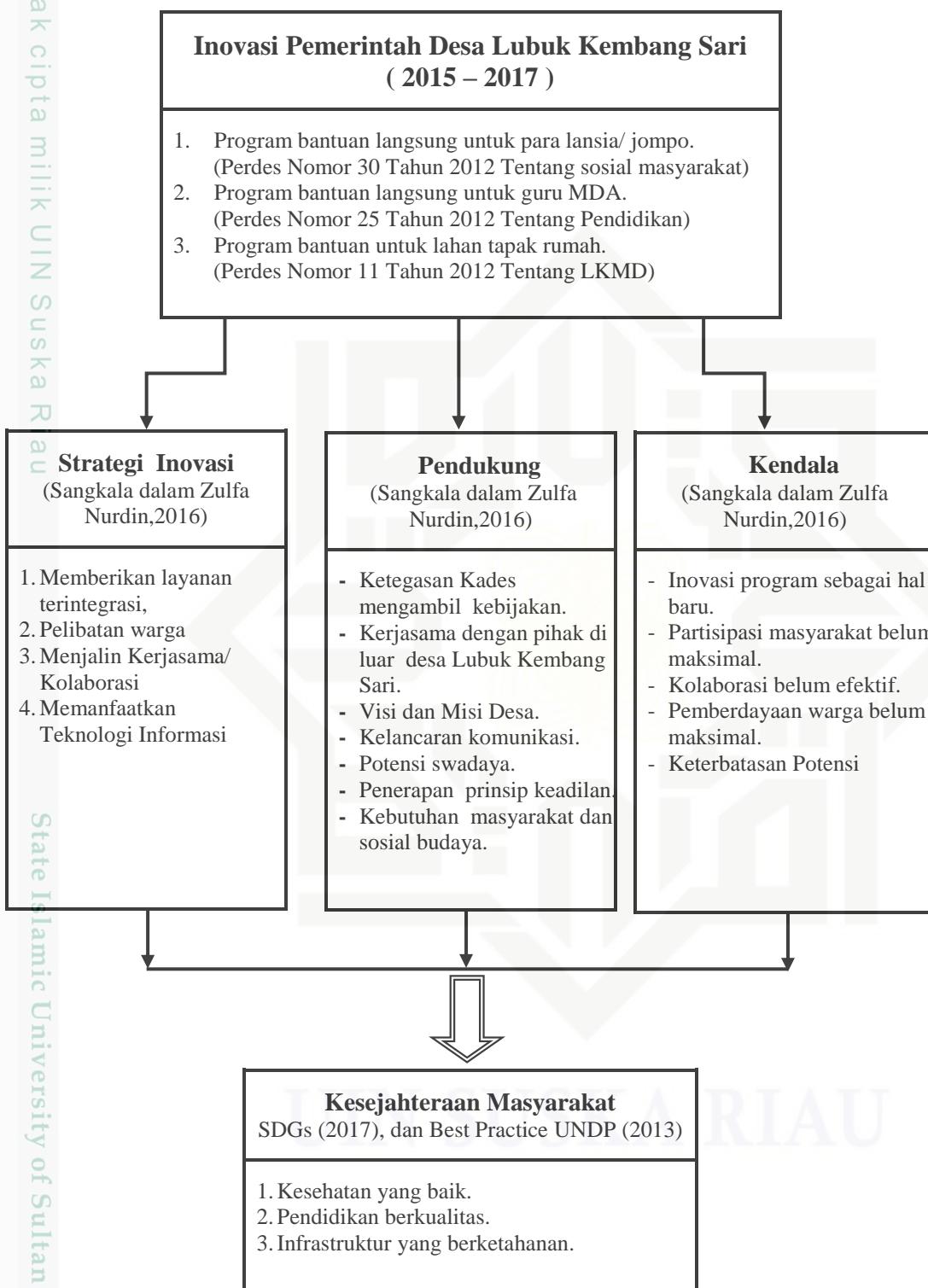
Berdasarkan penjelasan konsep operasional diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017